

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN DEWAN PENGUJI UJIAN TERTUTUP	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
GLOSARIUM	viii
DAFTAR SINGKATAN	xi
RINGKASAN DISERTASI	xii
SUMMARY DISSERTATION	xxxi
KATA PENGANTAR	xlvi
DAFTAR ISI	li
DAFTAR TABEL	lv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	15
a. Manfaat Secara Teoritis	15
b. Manfaat Secara Praktis	16
E. Kerangka Konseptual	16
F. Kerangka Teori	20
1. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, Teori Keadilan Pancasila sebagai <i>Gramd Theory</i>	23
a. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman	23
b. Teori Keadilan Pancasila	28
2. Teori Penegakan Hukum sebagai <i>Middle Theory</i>	38
3. Teori Tujuan Pemidanaan, dan Teori Hukum Progresif sebagai <i>Applied Theory</i>	51
a. Teori Tujuan Pemidanaan	51
b. Teori Hukum Progresif	58
G. Kerangka Pemikiran	62
H. Metode Penelitian	64
1. Paradigma Penelitian	64
2. Metode Pendekatan	64
3. Spesifikasi Penelitian	65

	4.	Jenis Sumber Data Penelitian	66
	5.	Teknik Pengumpulan Data	70
	6.	Teknik Penyajian Data	71
	7.	Analisis Data	71
I.		Originalitas Disertasi	72
J.		Sistematika Penulisan	75
BAB II		TINJAUAN PUSTAKA	77
	A.	Paradigma Pidana Penjara	77
	1.	Pengertian Pidana	77
	2.	Tujuan Pemidanaan	83
	3.	Pidana Penjara	93
	a.	Pengertian Pidana Penjara	93
	b.	Sejarah Pidana Penjara	95
	B.	Sistem Pemasyarakatan	110
	1.	Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia	110
	2.	Landasan Hukum Lembaga Pemasyarakatan ..	116
	3.	Klasifikasi Penghuni Lembaga Pemasyarakatan	118
	4.	Tujuan Lembaga Pemasyarakatan	118
	5.	Fungsi Lembaga Pemasyarakatan	121
	6.	Pengertian Narapidana	122
	7.	Hak-Hak Narapidana	122
	8.	Kewajiban Narapidana	126
	C.	Pidana Penjara (<i>al-Habsu, al-Sijnu</i>) Dalam Hukum Pidana Islam	127
	1.	Hukuman Penjara Terbatas	129
	2.	Hukuman Penjara Tidak Terbatas	131
BAB III		PELAKSANAAN PIDANA PENJARA DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN DI INDONESIA BELUM BERBASIS KEADILAN	135
	A.	Pidana Penjara Dalam Sistem Hukum Indonesia	135
	1.	Pengaruh Perkembangan Hak Asasi Manusia Pada Pidana Penjara Sebagai Bentuk Pemidanaan	135
	2.	Hak Asasi Narapidana Dalam Perkembangan Hukum Positif Di Indonesia	143
	B.	Pidana Penjara Berdasarkan Prinsip Pemasyarakatan .	151
	C.	Tahap-tahap Pemasyarakatan	154
	D.	Bentuk Pembinaan Berdasarkan Prinsip Pemasyarakatan	155
	E.	Hak-hak Narapidana	157
	F.	Pelaksanaan Pidana Penjara Dalam Sistem	

	Pemasyarakatan Di Indonesia Yang Belum Berbasis Nilai Keadilan	164
BAB IV	KELEMAHAN PIDANA PENJARA DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN DI INDONESIA SAAT INI	173
	A. Instrumen Hukum Internasional Tentang Perlakuan Terhadap Narapidana	173
	B. Hak Asasi Manusia Narapidana Dalam Hukum Nasional	183
	1. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945	183
	2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	185
	3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan	194
	4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	195
	5. Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)	198
	6. Peraturan Lain Terkait dan Berpengaruh terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan .	198
	C. Kelemahan Pidana Penjara Dalam Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia Saat Ini	207
BAB V	REKONSTRUKSI PELAKSANAAN PIDANA DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN BERNILAI KEADILAN	215
	A. Praktik Pelaksanaan Pidana Penjara Di Beberapa Negara	215
	1. Praktik Pelaksanaan Pidana Penjara Di Perancis	215
	2. Praktik Pelaksanaan Pidana Penjara Di New Zealand	222
	3. Praktik Pelaksanaan Pidana Penjara Di Arab Saudi	236
	B. Rekonstruksi Nilai	247
	C. Rekonstruksi Pelaksanaan Pidana Penjara Dalam Sistem Pemasyarakatan Bernilai Keadilan	253
BAB VI	PENUTUP	285
	A. Kesimpulan	283
	B. Implikasi Kajian Disertasi	287
	1. Implikasi Teoritis	287
	2. Implikasi Praktis	287

C. Saran	287
DAFTAR PUSTAKA	289
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL/BAGAN/SKEMA

	Halaman
Tabel 1 Kerangka Pemikiran	63
Tabel 2 Originalitas Disertasi	74
Tabel 3 Islamic Crimes	239
Tabel 4 Rekonstruksi Pelaksanaan Pidana Penjara Dalam Sistem Pemasyarakatan Bernilai Keadilan	277

